

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Saat ini Indonesia menganut suatu sistem dimana dalam pelaksanaan pemerintahannya dilimpahkan kepada daerah atau disebut dengan otonomi daerah. Diterapkannya sistem ini dikarenakan atas banyaknya pertimbangan – pertimbangan apalagi jika dilihat tidak sedikit kepentingan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah pusat, sehingga pelimpahan kewenangan dalam manajemen daerahnya masing - masing kepada seluruh daerah yang ada di Indonesia dinilai sebagai keputusan yang bagus (Rosidin, 2015). Maka dari itu otonomi daerah yang dijalankan dalam pelaksanaan pemerintahan, amatlah krusial karena adanya garis yang jelas dalam pengaturan kewenangan diantara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dengan terlaksanakannya otonomi daerah di seluruh Indonesia, bertujuan agar daerah mampu untuk merencanakan serta menjalankan segala kegiatan yang dinilai dapat menunjang pembangunan daerah tersebut secara mandiri. Selain itu dengan diberlakukannya otonomi daerah ini maka pemerintah pusat dapat fokus dengan urusannya sendiri tanpa harus dibebatkan dengan urusan di daerah karena urusan daerah telah diurus oleh daerahnya masing - masing. Serta hal ini memberikan keuntungan lain ke pemerintahan daerah, dimana pemerintah daerah tidak perlu takut untuk diintervensi atau diganggu oleh pihak lain yang tidak memiliki hubungan dengan penyelenggaraan pemerintahannya (Rosidin, 2015). Selaras dengan itu, saat

mulai di berlakukannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, menjadikan jumlah hal yang harus diurus oleh Pemerintah Daerah terbilang cukup banyak. Undang – Undang tersebut menjadi pedoman pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Dimana didalamnya pun mewajibkan hadirnya pembaruan yang lebih baik lagi dalam hal pelayanan ke masyarakat dan juga diharuskan untuk selalu berinovasi dalam memperoleh pemasukan dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Harus memikirkan sumber maupun pos pemasukan yang dapat dijadikan sumber pembiayaan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah. Salah satu sumber pemasukan yang mampu diperoleh daerah guna membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahannya bisa didapatkan dari PAD. PAD adalah pemasukan yang didapatkan daerah dengan melihat potensi yang dimiliki daerah tersebut. Penerimaan dari PAD ini nantinya dapat digunakan daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah yang tengah dijalankan sebagai bentuk dari desentralisasi. Selain itu sumber pemasukan daerah dari PAD ini dinilai cukup tinggi penerimaannya karena didapatkan dari retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, retribusi daerah adalah pungutan daerah yang didapatkan dari masyarakat karena Pemerintah Daerah telah memberikan jasa, pelayanan atau pemberian izin tertentu yang memang difokuskan untuk memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan. Adapun sumber-sumber PAD selain dari retribusi Pajak daerah terdiri dari:

1. Retribusi daerah
2. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan
3. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Seperti yang dijelaskan diatas penyumbang pemasukan keuangan daerah yang dihasilkan PAD salah satunya didapatkan dari retribusi daerah. Retribusi daerah pun juga dapat dikatakan menjadi sumber pemasukan yang memiliki kelebihan dibandingkan sumber pemasukan lainnya yaitu sumber ini dapat dipungut secara terus – menerus atau berkelanjutan selama pelayanan tetap diberikan ke masyarakat dan pengguna jasa fasilitas yang disediakan pemerintah atau bisa dibilang timbal balik pemerintah memberikan fasilitas dan mendapatkan hasil dari fasilitas yang diberikansedangkan masyarakat sebagai pengguna fasilitas harus membayar fasilitas tersebut (Pasla, 2016). Retribusi daerah pun menjadi landasan dari pemasukan daerah, yang berfungsi sebagai pendukung dalam peningkatan PAD. Adapun salah satu komponen untuk mendapatkan sumber pendapatan yang sah maka dapat diperoleh dari retribusi parkir.

Retribusi parkir merupakan sumber penerimaan daerah yang didapatkan dari dalam wilayahnya. Dimana pemasukan ini mampu dijadikan tolak ukur untuk melihat dan menilai besaran peningkatan atau penurunan PAD yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Hasil penerimaan yang didapatkan dari pemasukan tersebut nantinya juga dapat membangun fasilitas dan sarana perbaikan di bidang parkir karena pada dasarnya penerimaan tersebut akan berputar untuk penyelenggaraan

pemerintahan Retribusi parkir secara umum merupakan pungutan yang harus dibayarkan atas pemberian jasa maupun izin parkir yang telah disiapkan oleh Pemerintah untuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Yani, 2012).

Seperti banyaknya kota lainnya, Kota Semarang pun salah satu sumber pemasukannya diperoleh dari retribusi yang mana perannya begitu krusial dalam upaya peningkatan pemasukan daerah guna mengembangkan dan menyelenggarakan pemerintahan. Salah satu sumber pemasukan retribusi ialah retribusi parkir di kota Semarang. Tidak sedikitnya jumlah penduduk serta kendaraan yang berada di kota Semarang setiap harinya, memang seharusnya dibarengi dengan jumlah titik parkir yang tersedia. Diketahui hingga akhir tahun 2019, jumlah kendaraan motor yang beroda 2 dan 4 yang ada di Kota Semarang berjumlah kurang lebih 1.616.505 yang meliputi dari 1.370.402 unit kendaraan beroda 2 (85 %) dan 246.103 unit kendaraan beroda 4 (15 %). Tentunya dengan beragam kendaraan bermotor yang banyak jumlahnya, semakin meningkatkan permintaan akan tempat parkir baru. Terlebih pasti dalam 2 tahun setelah tahun 2019 pasti jumlah kendaraan jauh lebih meningkat yang artinya Kota Semarang mempunyai potensi yang tinggi untuk membuka lahan baru lokasi perparkiran mulai dari tepi jalan umum, pertokoan, rumah makan dan lainnya. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan yang memiliki tanggung jawab pada pelaksanaan terhadap pemasukan retribusi parkir, saat ini di Kota Semarang terdapat 790 titik parkir jalan umum. Melihat data tersebut sudah seharusnya pemasukan yang diperoleh dari retribusi parkir mampu menghasilkan lebih banyak

dan dapat meningkat terus jika dibandingkan dengan pemasukan yang sudah tercapai hingga saat ini jika dinas perhubungan selaku penanggung jawab dapat mengelola dengan baik.

Namun nyatanya realisasi pendapatan dari retribusi parkir dapat dikategorikan sangat jauh dari target yang ingin dicapai. Adapun pemasukan dari retribusi parkir yang dirangkum dalam realisasi penerimaan daerah sebagai berikut:

Tabel. 1.1.
Target dan Realisasi PAD dari Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang

Tahun	Target (RP)	Realisasi (RP)	Persentase (%)
2013	5.853.120.000	2.601.911.700	44,45 %
2014	3.700.000.000	2.783.789.500	75,23 %
2015	3.700.000.000	2.804.290.000	75,79 %
2016	3.850.000.000	3.012.751.000	78,25%
2017	4.235.000.000	2.529.446.000	59,73 %
2018	15.000.000.000	2.441.057.000	16,27 %

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kota Semarang

Berdasarkan tabel data di atas, dapat dianalisis yaitu dalam menjalankan manajemen parkir di Kota Semarang terbilang belum maksimal. Dibuktikan dengan realisasi yang diterima retribusi Kota Semarang. Retribusi parkir dari tahun 2016 hingga tahun 2018 menurun disebabkan target yang ditetapkan selalu ditingkatkan terus menerus dari tahun ke tahun sedangkan realisasi pendapatan yang diterima

berbanding terbalik dimana menurun setiap tahunnya. Dimana ini menimbulkan permasalahan dengan belum maksimalnya pemasukan retribusi parkir yang merupakan bagian dari PAD.

Selain itu juga terdapat permasalahan lainnya selain bukti realisasi yang tidak memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu banyaknya pelanggaran yang terjadi, walaupun telah diberikan rambu larangan lalu lintas dan terjun langsung ke lapangan yang kerap diadakan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang, masih ditemukan pelanggar yang memarkirkan kendaraannya pada kawasan larangan parkir. Berikut jumlah data pelanggar parkir pada tahun 2018 - 2020 di beberapa titik larangan parkir di Kota Semarang.

Tabel. 1.2.

Pelanggaran Parkir di Titik Larangan Parkir di Kota Semarang

No.	Kawasan	2018		2019		2020	
		Roda 2	Roda 4	Roda 2	Roda 4	Roda 2	Roda 4
1.	Jl. MH Thamrin	25	30	19	23	15	25
2.	Jl. Gajah Mada	5	23	2	21	8	20
3.	Jl. Pandanaran	74	75	76	86	86	93
4.	Jl. Pemuda	60	16	57	20	65	25
5.	Kawasan Simpang Lima	73	58	76	72	56	67

Sumber : Laporan Tahunan Dinas Perhubungan Kota Semarang

Berdasarkan tabel data di atas, dapat disimpulkan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi, dapat dilihat di 5 Jalan atau kawasan utama ramai pertokoan, lalu lintas dan lainnya di Semarang jumlah pelanggaran tiap tahunnya dapat dikatakan cukup banyak dan sering terjadi bahkan tercatat di satu kawasan atau jalan saja mencapai hampir 100 kejadian pelanggaran. Dimana angka tersebut merupakan jumlah pelanggaran yang tercatat oleh data saja jadi belum masih banyak pelanggaran yang mungkin tidak tertangkap atau tidak tercatat oleh Dinas Perhubungan yang mungkin jumlahnya masih banyak.

Selanjutnya juga ditemukan permasalahan lainnya yakni tarif parkir yang tidak sesuai. Banyak sekali dijumpai juru parkir yang memungut parkir seenaknya sendiri tidak sesuai aturan. Yang mana dalam aturan yang telah diatur dalam Peraturan Walikota No. 9 Tahun 2018 tentang Tarif Parkir Tepi Jalan Umum yakni untuk kendaraan beroda 2 dan 3 sebesar Rp. 2000,00 kendaraan beroda 4 Rp. 3.000,00 kendaraan beroda 6 dan seterusnya Rp. 15.000,00 namun nyatanya di lapangan tarif ini dinaikkan misalnya untuk kendaraan beroda 2 sebesar Rp.5.000 dan selebihnya.

Selain itu permasalahan zonasi parkir yang belum diinformasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui mana yang merupakan parkir resmi dan mana yang tidak resmi. Adapun berikut ini beberapa data parkir resmi di 3 jalan atau kawasan utama ramai pertokoan, lalu lintas dan lainnya di Kota Semarang yang tercatat dalam data di Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Tabel. 1.3.
Zonasi Titik Parkir Resmi di Kota Semarang

No.	Jalan	Titik Parkir	Keterangan
1	Gajahmada	DP. SKF - Tanah Kosong	Umum
2	Gajahmada	DP. Ruko No. 29.31.33.35	Umum
3	Gajahmada	DP. Samsung - Optic Metro	Umum
4	Gajahmada	DP. Toko Obor - Eks Elektra Tour	Umum
5	Gajahmada	DP. Tk Terang - Hotel Quirin	Umum
6	Gajahmada	DP. Binatu - Tk. Terang	Umum
7	Gajahmada	DP. Ayu Busana - Matahari Gordyn	Umum
8	Gajahmada	Hal. Geprek Benu	Umum
9	Gajahmada	DP. Hsbc & Resto Mart - Rm. Nusantara	Umum
10	Gajahmada	DP. RM. Happy	Umum
11	Gajahmada	DP. SMK Theresiana	Umum
12	Gajahmada	DP. K.24-Cafe Kepingin	Umum
13	Gajahmada	DP. Toko Modern Elektronik	Umum
14	Gajahmada	Depan Resto Sendok Bebek	Umum
15	Mh. Thamrin	DP. Tiki	Umum
16	Mh. Thamrin	DP. Soto Darno - Bakmi - Alfamart	Umum

17	Mh. Thamrin	DP. Toko Panen Rejo	Umum
18	Mh. Thamrin	DP. Toko Lusiana	Umum
19	Mh. Thamrin	DP. Klinik Derla	Umum
20	Mh. Thamrin	DP. WM. Bu Rum, Refil Tinta, Kafe Lingkar	Umum
21	Mh. Thamrin	DP. Khaisma	Umum
22	Mh. Thamrin	DP. Sate Ayam Ponorogo Pak Bagong	Umum
23	Mh. Thamrin	DP. Ndas Manyung - Tri Daya	Umum
24	Mh. Thamrin	Samping Pertamina	Umum
25	Mh. Thamrin	DP. Sinar Gadai Pratama - Ndas Manyung 555	Umum
26	Mh. Thamrin	DP. Soto Sapi - Nasi Pindang	Umum
27	Mh. Thamrin	DP. Tahu Gimbal Bu Tin - Roti Amanda	Umum
28	Mh. Thamrin	DP. Cv Gunung Emas - Bedgan Motor	Umum
29	Mh. Thamrin	CM Honda Jaya Motor	Umum
30	Mh. Thamrin	DP. Bank BTN	Umum
31	Pandanaran	DP. Optik Pandanaran - Sedap Mantap	Umum
32	Pandanaran	DP. Toko Buku Gramedia	Umum

33	Pandanaran	DP. Anamely	Umum
34	Pandanaran	DP. Rumah No.86	Umum
35	Pandanaran	DP. Indosat - Bukopin	Umum
36	Pandanaran	Depan Toko Buku Merbabu	Umum
37	Pandanaran	BRI Pandanaran	Umum
38	Pandanaran	DP. Optik Pandanaran - Callie	Umum

Sumber : Data Pendataan Titik Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang

Berdasarkan tabel data di atas, dapat disimpulkan sebenarnya titik parkir resmi yang tersedia pada 1 jalan atau kawasan saja sudah banyak jumlahnya. Namun karena terdapat permasalahan menyebabkan masih banyak masyarakat yang parkir tidak di titik resmi tersebut dan justru parkir di titik parkir tidak resmi.

Berdasarkan pemaparan diatas maka peneliti tertarik untuk memahami permasalahan ini lebih dalam. Penulis akan mempelajari beberapa jurnal yang berkaitan dengan manajemen parkir untuk membantu menemukan dan mengetahui keberhasilan manajemen parkir di kota lain dalam meningkatkan PAD kota tersebut. Terlebih pada Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai organisasi pemerintah yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana urusan pemerintahan yang berkaitan dengan prasarana dan fasilitas umum khususnya bidang lalu lintas dan perhubungan. Serta dimungkinkan untuk menemukan perbedaan dan persamaan antara jurnal penelitian terdahulu, yang nantinya memudahkan daerah lainnya yang mengalami masalah yang serupa untuk dapat menghasilkan jalan keluar yang sesuai dalam upaya

mengatasi masalah manajemen parkir untuk peningkatan PAD. Hal ini juga akan menjelaskan bagaimana manajemen parkir di Kota Semarang, indikator mana yang masih sudah terpenuhi atau belum terpenuhi, pihak-pihak yang terlibat, hambatannya, dan lainnya yang terkait dengan manajemen parkir untuk Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Semarang.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu bagaimana manajemen parkir yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain itu apa hambatan yang dialami dalam pelaksanaan manajemen parkir di Kota Semarang

1.3. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian kali ini yaitu untuk menganalisa manajemen parkir di Kota Semarang yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain itu untuk menganalisa hambatan yang dialami dalam pelaksanaan manajemen parkir di Kota Semarang.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk peneliti lain dalam melakukan penelitian yang lainnya. Selain itu Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kajian ilmu sebagai bahan informasi dan dokumentasi ilmiah guna

mengembangkan ilmu pengetahuan, serta menambah wawasan pembaca di kalangan pembaca khususnya mahasiswa Universitas Diponegoro program studi Administrasi Publik pada khususnya, dapat menambah referensi, dan diharapkan hasil penelitian yang telah dijalankan dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan dan menyempurnakan penelitian lain di kemudian hari, terlebih penelitian yang membahas tentang manajemen parkir di Kota Semarang untuk meningkatkan PAD.

1.4.2. Secara Praktis

1. Bagi Penulis Sebagai bahan untuk menganalisa penerapan teori yang didapatkan dengan fakta sesungguhnya mengenai manajemen parkir di Kota Semarang untuk meningkatkan PAD.
2. Bagi Pihak Pemerintah Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan masukan bagi Pemerintah Kota Semarang terkhusus Dinas Perhubungan Kota Semarang dan pihak lain yang terhubung dengan manajemen parkir agar dapat menemukan jalan keluar dan solusi mengenai manajemen parkir untuk meningkatkan PAD. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi parameter dan evaluasi untuk pemerintah.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

Guna mendukung riset ini, harus ada teori-teori yang dapat mendukung ataupun memperkuat riset dan menjadi landasan teoritik untuk membahas permasalahan yang akan dikaji. Teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan topik serta judul yang penulis akan laksanakan penelitiannya maka penulis akan mendalami beberapa penelitian terdahulu sehingga dapat paham betul mengenai teori serta bahan kajian pada penelitian ini. Diharapkan dengan adanya penelitian dahulu dapat membantu penulis untuk menilai apakah ada penelitian lainnya yang memiliki fokus dan lokus yang sama dengan yang akan penulis angkat dalam tulisan ini. Berikut beberapa jurnal yang memiliki hubungan dengan topik bahasan yang akan diteliti oleh penulis.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dessy Wulan Sari (2017) dalam artikel yang berjudul Strategi Dinas Perhubungan dalam Pengelolaan Parkir dengan studi kasus di Kota Malang. Penelitian diharapkan dapat menggambarkan dan menilai strategi serta kendala yang harus dilalui oleh Dinas Perhubungan dalam upayanya mengelola parkir guna meningkatkan PADdi Kota Malang. Metodologi penelitian kualitatif dipakai pada penelitian ini dengan berbagai instrumen yaitu antara lain wawancara, observasi (pengamatan), studi pustaka dan dokumentasi. Dessy Wulan Sari dalam penelitiannya memfokuskan pada strategi dan hambatan yang dialami dalam pengelolaan parkir. Hasil penelitian yang didapatkan setelah melakukan analisis adalah Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan pengelolaan parkirnya hanya menerapkan 1 program saja yaitu program peningkatan pelayanan angkutan. Dinas Perhubungan dalam menjalankan pengelolaan parkir berdasarkan pada SOP. Namun walaupun sudah sesuai masih terdapat kendala yang

dialami seperti keterbatasan jumlah SDM untuk mengawasi parkir liar oleh sebab itu diberikan solusi untuk Dinas Perhubungan melakukan kerja sama dengan TNI dan Satpol PP. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Dinas Perhubungan dalam menjalankan pengelolaan parkir telah mengikuti SOP adapun perbuatan yang kurang selaras dikarenakan keterbatasan yang dimiliki. Solusi yang diberikan yaitu dengan Dinas Perhubungan melakukan berbagai strategi seperti bekerja sama dengan TNI dan Satpol PP, melakukan musyawarah dan koordinasi agar kebijakan tersebut bisa diterima serta dapat memberikan kesejahteraan bagi semua pihak.

Selanjutnya berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dicky Yuduf, dkk. (2019) dalam artikel yang berjudul Strategi Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Palu. Dilakukannya penelitian dimaksudkan untuk menjawab serta menganalisis strategi yang telah dijalankan dalam upaya pengelolaan dan pemungutan retribusi parkir yang mana bertujuan untuk memperbaiki pengelolaan retribusi pelayanan parkir dalam upaya meningkatkan PAD Kota Palu. Metodologi penelitian kualitatif tipe deskriptif dipakai pada penelitian ini dengan pendalaman pada wawancara yang dikaitkan dengan segala aspek kehidupan dan seberapa baik pengelolaan retribusi parkir yang dilakukan. Penelitian ini memfokuskan pada strategi serta upaya yang diupayakan dalam upaya peningkatan PAD. Hasil penelitian menunjukkan situasi pengelolaan parkir di Kota Palu yang pada nyatanya di lapangan belum rapi serta belum maksimal dalam cara pengelolaan parkir, dibuktikan dengan berbagai masalah yang ditemukan seperti

badan jalan yang digunakan sehingga berkurang dan tidak sesuai fungsinya, sedikitnya ruang parkir yang tersedia mengakibatkan kemacetan di ruas jalan yang dijadikan lahan parkir, masih adanya pelanggaran penarikan retribusi yang tidak seharusnya berbeda dari tarif yang telah ditentukan dan lainnya. Melihat hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan Perda yang dijalankan belum bekerja secara maksimal yang mengakibatkan dibutuhkan pembicaraan ulang terhadap pengguna Perda melalui kegiatan pengecekan langsung ke masyarakat sesuai kebutuhan.

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Feriyanti Barasa (2019) dalam artikel yang berjudul Strategi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Upaya Penertiban Parkir Ilegal dengan studi kasus di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menilai strategi serta faktor penghambat dan faktor pendukung bagi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Metodologi penelitian kualitatif tipe deskriptif dipakai pada penelitian ini dengan pendalaman pada pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian berada pada strategi yang digunakan dengan menggunakan analisis SWOT, serta faktor penghambat dan pendukung pengelolaan penertiban parkir. Hasil penelitian menunjukkan upaya penertiban parkir ilegal belum berjalan efektif. UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tidak memiliki strategi khusus dan hanya menjalankan tindakan preventif yang mana bersifat sementara sehingga menyebabkan penanganan parkir ilegal tidak dapat diselesaikan secara tuntas

serta masih banyaknya faktor penghambat yang menghambat pengelolaan parkir seperti terbatasnya jumlah lahan parkir dan jumlah lapangan pekerjaan bagi para juru parkir liar. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa Dinas Perhubungan tidak memiliki strategi khusus hanya melakukan tindakan preventif dan masih banyak faktor penghambat yang membuat pengelolaan jadi lebih sulit lagi untuk dikelola maka diberikan solusi yang dianggap relevan dan dapat membantu misalnya seperti menyediakan lahan parkir, menindak tegas parkir ilegal, dan membentuk tim pengawasan khusus perparkiran.

Lalu berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Ilmiarti Amril, dkk. (2014) dalam artikel yang berjudul Konflik Pengelolaan Parkir Liar di Pantai Purus, Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Penelitian ditunjukkan untuk dapat menjelaskan konflik yang terjadi dalam pengelolaan parkir liar di Purus Padang. Metodologi penelitian kualitatif tipe deskriptif dipakai pada penelitian ini dengan instrumen penelitian yaitu wawancara, pengamatan langsung dan dokumentasi. Penelitian ini memfokuskan pada Konflik yang terjadi didalam pengelolaan parkir liar. Hasil penelitian menunjukkan hadirnya parkir liar di Pantai Purus didasarkan pada permasalahan jembatan penghubung yang telah ada sejak tahun 2008 hingga tahun 2013. Bentuk persoalan yang dialami dalam pengelolaan parkir liar antara lain permasalahan yang terjadi diantara petugas parkir liar dengan pengguna jasa parkir, lalu permasalahan petugas parkir liar dengan Bidang perparkiran. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa konflik yang terjadi di

Purus Padang telah berjalan cukup lama dan masih berlanjut sampai sekarang, upaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi yakni dengan cara musyawarah dan cara kooperasi. Dalam menjalankan penertiban ini, Dishub meminta bantuan dari Tim Pengendalian Parkir.

Kemudian berdasarkan penelitian yang diteliti oleh M. Dhian Bagus Aprian (2019) dalam artikel yang berjudul Strategi Dinas Perhubungan dalam Mengelola Parkir di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam mengelola parkir di pasar tengah Kota Bandar Lampung. Metodologi penelitian kualitatif tipe deskriptif dipakai pada penelitian ini dengan pendalaman pada pengamatan langsung, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Fokus penelitian berada pada strategi dalam mengelola permasalahan parkir dengan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan parkir sudah dilakukan namun kurang maksimal. Hal ini dikarenakan ditemukannya berbagai kendala dan tantangan yang harus dihadapi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung. Penelitian ini memberikan kesimpulan perlu adanya upaya lainnya agar strategi berhasil misalnya memasang kamera CCTV di setiap ruang parkir yang asasnya dimana fungsinya untuk mengawasi gerak – gerak secara jelas dan setiap saat dan jika ditemukan gerak gerik yang mencurigakan terdapat bukti yang valid, mengatur kembali kondisi internal, dan mengatur kondisi lahan parkir di Pasar Tengah.

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Naufal Ali (2019) dalam artikel yang berjudul Strategi Humas Dinas Perhubungan dalam Mengatasi Parkir Liar di Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan menjelaskan strategi dan tahapan yang digunakan oleh Humas Dinas Perhubungan dalam mengatasi parkir liar di Kota Bekasi. Metodologi penelitian kualitatif tipe deskriptif dipakai pada penelitian ini dengan pendalaman pada pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini memfokuskan pada strategi dan tahapan yang dilakukan dalam proses pengelolaan parkir. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan parkir liar di Kota Bekasi sudah mencapai 64 % dari peningkatan penetapan titik parkir resmi dari tahun 2017 hingga 2019. Dengan demikian maka strategi humas yang dilakukan oleh Humas Dishub melalui pencarian fakta hingga sosialisasi mengenai parkir liar terhadap masyarakat dan pengendara kendaraan bermotor di Kota Bekasi memberikan dampak terhadap pengurangan titik parkir liar di Kota Bekasi. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa pengelolaan parkir di Kota Bekasi telah memberikan dampak yang positif walaupun masih ada hambatan yang harus dihadapi. Solusi yang dapat diberikan untuk mempertahankan capaian ini yaitu melakukan sosialisasi, melakukan atau melibatkan pihak - pihak lainnya untuk membangun komitmen bersama dalam mengatasi parkir liar.

Lalu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nia Elfina Purba (2017) dalam artikel yang berjudul Pengelolaan Parkir di Kabupaten Brebes. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskandan menilai sejauh mana pengelolaan perparkiran di

Kabupaten Brebes tahun 2011 – 2016 dan hambatan yang dihadapi dalam proses pengelolaannya. Metodologi penelitian kualitatif tipe deskriptif dipakai pada penelitian ini dengan pendalaman pada pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan parkir yang sedang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan parkir di Kabupaten Brebes kurang berhasil dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan Dimana kegagalan tersebut dikarenakan oleh berbagai faktor. Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa strategi yang diterapkan belum optimal, oleh sebab itu semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini harus saling membantu untuk menyelesaikan persoalan tersebut seperti menambah jumlah titik parkir, memberikan tindakan tegas kepada juru parkir yang diketahui melanggar peraturan dan melaksanakan pengawasan secara ketat kepada Wajib Pajak.

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nita Haryani, dkk. (2015) dalam artikel yang berjudul Strategi Pengelolaan Perparkiran di Kota Salatiga. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan parkir yang telah dijalankan di Kota Salatiga serta faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan parkir. Metodologi penelitian kualitatif tipe deskriptif dipakai pada penelitian ini dengan pendalaman pada pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi. Fokus penelitian berada pada pelaksanaan serta faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengelolaan. Hasil penelitian menunjukkan kondisi penataan parkir di Kota Salatiga

masih kurang terlaksana secara maksimal, yang mana disebabkan oleh manajemen perparkiran yang dimiliki UPT dan penerapan perda masih buruk ditambah lagi hambatan yang harus dihadapi dalam pengelolaan parkir. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa strategi yang diterapkan belum optimal, maka perlu upaya atau strategi baru dalam pengelolaan perparkiran di Kota Salatiga yaitu dengan merencanakan tindakan yang sesuai agar strategi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Kemudian berdasarkan penelitian yang dijalankan oleh Riski Atika Sari (2017) dalam artikel yang berjudul Strategi Dinas Perhubungan dalam Mengatasi Parkir Liar di Tepi Jalan Umum Kota Metro. Penelitian ini bertujuan memberikan penjelasan dan penilaian tentang strategi Dinas Perhubungan Kota Metro dalam mengatasi parkir liar di tepi jalan umum Kota Metro. Metodologi penelitian kualitatif tipe deskriptif dipakai pada penelitian ini dengan pendalaman pada pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini memfokuskan pada strategi yang dilakukan dalam upaya pengelolaan parkir liar dengan menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Perhubungan melalui Bidang Perparkiran Kota Metro tidak mempunyai strategi khusus dalam mengatasi parkir liar. Bidang Perparkiran Kota Metro hanya melaksanakan tindakan preventif yang sifatnya sementara yang akhirnya menyebabkan penyelesaian permasalahan parkir liar tidak tuntas. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa strategi yang diterapkan hanya sebatas preventif perlu adanya strategi lainnya yang

dilakukan dalam menyelesaikan masalah parkir liar seperti merekrut juru parkir dengan menyediakan tempat parkir yang strategis dan lainnya.

Terakhir berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Septian Wulandari (2015) dalam artikel yang berjudul Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Samarinda. Penelitian ini dimaksudkan agar dapat memberikan penjelasan mengenai pengelolaan parkir tepi jalan yang dilaksanakan oleh Bidang Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan faktor penghambat yang dialami dalam pengelolaan parkir tepi jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Metodologi penelitian kualitatif dipakai pada penelitian ini dengan pendalaman pada studi kepustakaan, pengamatan langsung, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan parkir tepi jalan oleh UPTD pengelola parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan hambatan yang harus dialami. Hasil penelitian menunjukkan telah dijalankannya prinsip-prinsip manajemen pengelolaan parkir dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan, dari tahap awal yaitu perencanaan dengan menetapkan lokasi parkir yang dinilai memiliki potensi, lalu pengorganisasian dengan melakukan perekrutan dan membagi kerja petugas parkir, lalu pelaksanaan dengan menyediakan sarana dan prasarana serta pengawasan dan evaluasi kerja. Kenyataannya, realisasi pemasukan retribusi parkir masih memerlukan perbaikan sebab tidak memenuhi target. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa masih perlu adanya peningkatan,

beberapa solusi misalnya menjalin kemitraan dengan pihak ketiga/ swasta, UPTD senantiasa melaksanakan sosialisasi ke masyarakat dengan cara pemasangan spanduk dan menugaskan para juru parkir untuk memberitahu masyarakat agar memarkirkan kendaraannya di tempat parkir resmi yang sudah disiapkan.

Dari penelitian-penelitian terdahulu tentang strategi pengelolaan parkir liar dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek penelitian yang diteliti umumnya terkait strategi pengelolaan parkir, hambatan pengelolaan, faktor penghambat dan pendukung pengelolaan dan ada analisis swot sebagai cara untuk melihat strategi yang dibuat tepat atau tidak. Adanya aspek penelitian tersebut merupakan hal-hal yang memang perlu dilakukan bagi keperluan efisiensi dan efektivitasberjalannya sebuah pengelolaan parkir yang baik. Walaupun begitu unsur-unsur lain seperti faktor lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi juga penting untuk difokuskan karena dengan memfokuskan hal tersebut kita tahu apa yang menjadi kendala diluar dan didalam organisasi sehingga strategi yang dipilih pun dapat ditentukan ingin diterapkan di organisasi atau luar organisasi. Fokus penelitian ini nanti yaitu strategi pengelolaan parkir liar, kendala atau hambatan, faktor pendukung dan penghambatan mendalam. Terkait dengan Literature Review tentang penelitian sebelum ini lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.4.

Kajian Penelitian Terdahulu

No .	Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Penulis
1.	Dessy Wulan Sari (2017) Strategi Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Parkir Studi Kasus Di Kota Malang. Universitas Muhammadiyah Malang.	Mendeskripsikan dan menganalisis strategi dan hambatan yang harus dialami oleh Dinas Perhubungan Dalam pengelolaan parkir guna peningkatan PAD Kota Malang.	Kualitatif, teknik untuk mendapatkan data dengan pengamatan langsung, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.	Dinas Perhubungan dalam menjalankan pengelolaan parkir hanya mempunyai 1 program saja yaitu program upaya meningkatkan pelayanan angkutan. Dinas Perhubungan dalam menjalankan pengelolaan parkir berpedoman pada SOP namun walaupun sudah sesuai masih terdapat kendala - kendala yang dialami seperti keterbatasan jumlah SDM untuk mengawasi parkir liar yang membuat belum optimalnya pengelolaan parkir.	Penelitian ini memiliki fokus yang sedikit berbeda, dalam penelitian ini yaitu mengenai strategi pengelolaan parkir liar sedangkan penelitian ini mengenai manajemen parkir guna peningkatan PAD. Untuk subyek program dan lokus juga berbeda karena penelitian ini dilakukan di Malang. Namun tetap dapat menjadi acuan dalam penelitian penulis karena terdapat proses manajemen di dalamnya.

2.	Dicky Yuduf, dkk. (2019) Strategi Pengelolaan Dan Pemungutan Retribusi Parkir Di Kota Palu. Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik - Vol. 06 No. 01	Menganalisis Strategi pengelolaan dan Pemungutan retribusi parkir, serta upaya yang dapat Dijalankan dalam upaya Peningkatan Pengelolaan Retribusi pelayanan parkir Upaya peningkatan PAD Kota Palu.	Kualitatif deskriptif, teknik untuk mendapatkan data dengan wawancara, Pengamatan langsung, dan studi dokumentasi.	Menunjukkan kondisi penataan parkir di Kota Palu kurang tertata rapi serta kurang maksimal cara pengelolaan parkir, seperti beberapa badan jalan yang dijadikan lahan parkir sehingga badan jalan berkurang dan tidak sesuai dengan fungsinya, sedikitnya ruang parkir mengakibatkan kemacetan di sejumlah ruas jalan pada jam tertentu karena digunakan sebagai lahan parkir dan masih ditemukannya pelanggaran berupa tarif retribusi yang tidak sesuai ketentuan	Penelitian ini memiliki fokus yang sama namun locus yang berbeda. Fokus dalam penelitian ialah manajem peningkatan pendapatan daerah melalui parkir. Sedangkan lokusnya di Kota Palu. Untuk itu penelitian ini dapat menjadi acuan karena bisa dicari adakah perbedaan karena setiap kota pastinya memiliki karakteristik yang berbeda.
3.	Feriyanti Barasa (2019) Strategi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dalam	Mengidentifikasi dan Menganalisis Strategi serta faktor Penghambat Dan	Kualitatif deskriptif, teknik untuk mendapatkan data dengan pengamatan	Pekanbaru Dalam Menertibkan Parkir Ilegal di Kota Pekanbaru belumah berjalan efektif. UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tidak memiliki strategi khusus dan hanya melakukan tindakan preventif yang	Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, dalam penelitian ini yaitu mengenai strategi pengelolaan parkir liar sedangkan penelitian penulis lebih ke manajemen parkir guna peningkatan

	Menertibkan Parkir Ilegal Dengan Studi Kasus Di Kota Pekanbaru. JOM FISIP Vol. 6 Edisi I	faktor pendukung bagi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.	langsung, wawancara, dan dokumentasi.	sifatnya sementara yang akhirnya penyelesaiannya pun tidak beres serta adanya berbagai faktor penghambat yang menghambat pengelolaan parkir seperti terbatasnya jumlah lahan parkir dan jumlah pekerjaan bagi para juru parkir liar.	PAD. Untuk lokus dalam penelitian juga berbeda karena penelitian ini dilakukan di Pekanbaru. Namun dapat menjadi acuan dalam penelitian penulis karena membahas manajemen didalamnya.
4.	Ilmiati Amril, dkk. (2014) Konflik Pengelolaan Parkir Liar Di Pantai Purus, Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Jurnal Ilmu Sosial Mamangan, Vol. 3 No. 1	Menjelaskan Konflik pengelolaan parkir liar di Purus Padang	Kualitatif deskriptif, teknik untuk mendapatkan data dengan wawancara, pengamatan langsung, dan studi dokumentasi.	Hadirnya parkir liar di Pantai Purus diawali dengan adanya jembatan penghubung yang telah ada sejak tahun 2008 hingga tahun 2013. Bentuk konflik yang ada dalam pelaksanaa pengelolaan parkir liar pun beragam misalnya permasalahan yang terjadi diantara petugas parkir liar dengan pemilik kendaraan, lalu konflik petugas parkir liar dengan UPT perparkiran dalam proses penertiban	Penelitian ini memiliki fokus dan locus yang berbeda. Penelitian ini berfokus ppada konflik yang terjadi dan proses pencarian solusi. Sedangkan penelitian penulis mengenai manajemen parkir guna peningkatan PAD. Namun tetap dapat dijadikan acuan oleh penulis.

5.	M. Dhian Bagus Aprian (2019) Strategi Dinas Perhubungan Dalam Mengelola Parkir Di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung. Universitas Lampung.	Menilai strategi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam mengelola parkir di pasar tengah Kota Bandar Lampung.	Kualitatif deskriptif, teknik untuk mendapatkan data dengan observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi.	Pengelolaan parkir Di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung sudah dilakukan namun kurang maksimal, karena dihadapkan pada kendala dan tantangan yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.	Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda dalam penelitian ini yaitu mengenai strategi pengelolaan parkir liar sedangkan penelitian penulis manajemen parkir guna peningkatan PAD. Untuk subyek program dan lokus dalam penelitian juga berbeda karena penelitian ini dilakukan di Lampung. Namun dapat menjadi acuan dalam penelitian penulis karena membahas manajemen.
----	--	--	---	--	--

6.	Muhamad Naufal Ali (2019) Strategi Humas Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Parkir Liar Di Kota Bekasi (Studi .Pada Dinas Perhubungan Dalam Larangan Parkir Liar Di Kota Bekasi).	Mendeskripsikan strategi dan tahapan yang digunakan oleh Humas Dinas Perhubungan Dalam mengatasi permasalahan parkir liar di Kota Bekasi.	Kualitatif deskriptif, teknik untuk mendapatkan data dengan wawancara, pengamatan langsung, dan dokumentasi.	Pengelolaan parkir liar di Kota Bekasi sudah mencapai 64% dari peningkatan penetapan titik parkir resmi dari tahun 2017 hingga 2019. Dengan demikian maka strategi humas yang dilakukan oleh Humas Dishub melalui pencarian fakta hingga sosialisasi mengenai parkir liar terhadap masyarakat dan pengendara kendaraan bermotor di Kota Bekasi memberikan dampak terhadap pengurangan titik parkir liar	Penelitian ini memiliki fokus yang berbeda penelitian ini mengenai strategi pengelolaan parkir liar sedangkan penelitian penulis lebih ke manajemen parkir guna peningkatan PAD. Lalu subyek program dan lokus juga berbeda karena dilakukan di Bekasi. Namun dapat menjadi acuan dalam penelitian penulis karena membahas manajemen.
----	--	---	--	---	---

7.	Nia Elfina Purba (2017) Pengelolaan Parkir Di Kabupaten Brebes. Journal Of Politic And Government Studies. Vol. 7 No. 1	Menjelaskan dan Menilai pengelolaan perparkiran di Kabupaten Brebes tahun 2011 – 2016 dan hambatan yang dihadapi dalam proses pengelolaan parkir	Kualitatif deskriptif, teknik untuk mendapatkan data dengan pengamatan langsung, wawancara dan dokumentasi.	Pengelolaan parkir di Kabupaten Brebes nyatanya belum dijalankan secara maksimal sehingga tujuan yang diharapkan pun tidak dapat terpenuhi. Didalam pelaksanaannya pencapaian retribusi parkir yang di pungut masih jauh jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Yang mana disebabkan oleh beberapa faktor yang mana salah satunya masih ditemukannya perbuatan curang.	Penelitian ini memiliki fokus dan locus yang berbeda. Penelitian ini yaitu mengenai strategi pengelolaan parkir liar dan penelitian dilakukan di Brebes. Sedangkan penulis mengenai manajemen parkir guna peningkatan PAD. Namun dapat menjadi acuan dalam penelitian penulis karena membahas manajemen didalamnya.
8.	Nita Haryani, dkk. (2015) Strategi Pengelolaan Perparkiran Di Kota Salatiga. Ejournal UNDIP.	Mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan parkir yang telah dilakukan di Kota Salatiga serta faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan	Kualitatif deskriptif, teknik untuk mendapatkan data dengan pengamatan langsung, wawancara dan dokumentasi.	Kondisi penataan parkir di Kota Salatiga masih belum maksimal, hal ini disebabkan oleh pengolaan perparkiran yang dimiliki UPT dan penerapan perda masih buruk ditambah lagi hambatan yang harus ditemukan dalam pengelolaan parkir.	Penelitian ini memiliki fokus dan locus yang berbeda. Penelitian ini yaitu mengenai strategi pengelolaan parkir dan penelitian dilakukan di Salatiga. Namun dapat menjadi acuan dalam penelitian penulis karena membahas manajemen didalamnya.

9.	Riski Atika Sari (2017) Strategi Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Parkir Liar Di Tepi Jalan Umum Kota Metro (Studi Pada Dinas Perhubungan)	Mendeskripsikan dan menilai strategi Dinas Perhubungan Kota Metro dalam upaya mengatasi parkir di tepi jalan Kota Metro.	Kualitatif deskriptif, teknik untuk mendapatkan data dengan pengamatan langsung, wawancara, angket dan dokumentasi.	Dinas Perhubungan melalui UPT Perparkiran Kota Metro tidak mempunyai strategi khusus dalam mengatasi parkir liar. UPT Perparkiran Kota Metro hanya menjalankan tindakan preventif yang sifatnya sementara sehingga menghasilkan penyelesaian yang tidak tuntas.	Penelitian ini memiliki fokus dan locus yang berbeda. Penelitian ini yaitu mengenai strategi pengelolaan parkir liar dan penelitian dilakukan di Metro. Namun dapat menjadi acuan dalam penelitian penulis karena membahas manajemen didalamnya.
10.	Septian Wulandari (2015) . Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Oleh UPTD Pengelola Parkir Pada Dinas Perhubungan Di Kota Samarinda.	Mengidentifikasi pengelolaan parkir tepi jalan yang dijalankan oleh UPTD Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda dan hambatan	Kualitatif, teknik untuk mendapatkan data dengan pengamatan langsung, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi.	UPTD pengelola parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah menjalankan prinsip manajemen pengelolaan parkir tepi jalan dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan, dimulai dari awal yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan dan penilaian kerja.	Penelitian ini memiliki fokus yang sama, penelitian ini membahas mengenai manajemen parkir, faktor penghambat dan pendukung. Sedangkan untuk lokus dalam penelitian ini berbeda karena penelitian ini dilakukan di Samarinda. Untuk itu penelitian ini dapat menjadi acuan karena bisa dicari adakah perbedaan

	Administrasi Negara, Vol. 3 No.1	pengelolaan parkir di Kota Samarinda.		Kenyataannya, realisasi pemasukan retribusi parkir tidak dapat mencapai target	karena setiap kota pastinya memiliki karakteristik yang berbeda
--	--	---	--	--	---

Sumber : Data Olahan Peneliti

1.5.2. Administrasi Publik

Secara etimologis, kata administrasi publik didapatkan dari 2 kata yang menyusunnya yaitu administrasi dan publik. Dimana kata administrasi diadaptasi dari bahasa latin *administrare* yakni *ad* yang artinya pada dan *ministrare* yang artinya melayani, yang mana jikadisambung menjadi satu memiliki arti pelayanan kepada. Lalu selain dari bahasa latin kata administrasi juga didapatkan dari bahasa inggris yakni dari kata *administration* atau *to administer* yang artinya *to manage* atau mengelola dan *to direct* atau menggerakkan (Indradi, 2006). Sedangkan kata publik sendiri didapatkan dari bahasa inggris yakni dari kata *public* yang memiliki arti umum, banyak orang, rakyat (Pasolong, 2008).

Pendapatan lainnya mengenai pengertian administrasi publik pun beragam. Administrasi publik merupakan proses dimana sumber daya yang ada dikelola dan dikoordinasikan untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan maupun pilihan yang diambil untuk dijadikan suatu kebijakan public (Keban, 2008). Sedangkan pendapat lain mengemukakan bahwa administrasi publik menggambarkan pemerintahan sebagai agen tunggal yang memiliki kuasa dan sebagai regulator yang aktif dan berusaha untuk berinovasi dalam menjalankan langkah atau rencananya yang dianggap krusial dan bermanfaat bagi masyarakat. Dikarenakan pada saat itu masyarakat dianggap sebagai pihak yang berbeda jauh dari pemerintah yakni sebagai pihak yang pasif, tidak mampu serta wajib taat dan menerima semua hal yang telah diatur oleh pemerintah (Keban, 2008).

Lalu juga ada pendapat yang mana mengungkapkan bahwa administrasi publik merupakan suatu hal yang wajib diprioritaskan karena menyangkut kepentingan – kepentingan masyarakat, administrasi publik diharapkan dapat cekatan dan melaksanakan tugasnya dengan baik (Kasim, 1993). Selanjutnya menurut Barton dan Chapel dalam Keban (2008:5) administrasi publik sebagai *the work of government* atau pekerjaan yang dijalankan pemerintah.

Berdasarkan beragam pendapat diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik merupakan suatu proses yang dijalankan oleh pemerintah dimana didalamnya berisi kegiatan perumusan, pengimplementasian dan pengelolaan keputusan yangtelah diambil dan dijadikan kebijakan publik. Yang mana penentuan suatu kebijakan didasarkan pada kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Selain itu dengan adanya administrasipublik diharapkan pekerjaan dapat dijalankan secara efektif dan efisien.

1.5.3. Paradigma Administrasi Publik

Beragam - macam perubahan terjadi seiring dengan kajian dan praktik administrasi publik yang terus berkembang. Beragam persoalan dialami oleh administrator publik, dimana kesulitan ini membuat para ahli akhirnya tergerak untuk mengembangkan ilmu administrasi publik. Denhart dan Denhart dalam Nugroho (2018) mengemukakan bahwa terdapat tiga perspektif dalam administrasi publik. Perspektif tersebut adalah *Old Public Administration*, *New Public Management*, dan *New Public Service*.

Model *Old Public Administration* atau yang disebut Administrasi Publik Klasik adalah sebuah perspektif administrasi publik yang menjelaskan bagaimana pemerintah melaksanakan tindakan demokratis, efektif, dan efisien, serta bebas dari kecurangan, dan bagaimana pemerintah mampu berjalan secara sesuai, benar, dan tercapai Wilson dalam Nugroho (2018). Fokus perhatian dalam perspektif ini adalah ada pada hubungan timbal balik yang terjadi di organisasi pemerintah yang disusun berlandaskan hierarki. Dengan struktur hierarkis yang tertuju pada pemerintah, membuat ikatan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat lebih mengarah ke ikatan seperti atasan dan bawahan, hubungan timbal balik yang terjalin berlangsung secara sepihak dan tidak seimbang, kerja sama struktural dan formal, hingga tidak adanya kolaborasi sama sekali.

Pada akhirnya mengakibatkan organisasi publik dipandang tidak efektif, tidak efisien, miskin inovasi, serta tidak produktif. Maka dari itu muncullah sebuah langkah reformasi manajemen sektor publik, yang mana menyebabkan lahirnya paradigma baru yaitu *New Public Management* (NPM). Paradigma NPM menginginkan suatu birokrasi yang mempunyai karakteristik *good governance*, dengan mempunyai keahlian dalam berkompetisi, berakuntabilitas, responsif terhadap perubahan, berlandaskan pada aturan hukum, mendukung keikutsertaan, memfokuskan pada kualitas, efisien dan efektif, berkeadilan, serta membangun sebuah orientasi terhadap nilai-nilai guna mewujudkan *good governance* itu sendiri.

NPM mempunyai pemikiran bahwa praktik manajemen yang dijalankan di swasta jauh lebih bagus jika dibandingkan dengan praktik manajemen yang dijalankan di publik. Hal ini dikarenakan perlu dilakukan adopsi terhadap berbagai praktik atau teknik manajemen yang dijalankan di swasta ke dalam pelaksanaan manajemen di publik untuk meningkatkan kinerja sektor publik. Berbagai praktik tersebut seperti mekanisme pasar, adanya persaingan, serta privatisasi perusahaan publik. NPM memiliki karakter khas yang terfokus pada perubahan lingkungan birokrasi dilandaskan oleh peraturan baku untuk mewujudkan suatu sistem manajemen publik yang lebih bebas serta terfokus pada kepentingan publik. Selain menerapkan teknik administrasi baru, NPM juga menerapkan seperangkat nilai khusus seperti halnya *Old Public Administration*. Dimana menyebabkan NPM dihadapkan pada kritik keras dari banyak pakar. Hingga tahun 2003 diperkenalkan paradigma baru yaitu *New Public Service*.

NPS merupakan pandangan yang menginginkan egaliter dan persamaan hak diantara warga negara. Didalam pandangan NPS kebijakan publik bukan diputuskan oleh para politikus akan tetapi kebijakan publik diputuskan berdasarkan dari hasil pembicaraan yang beragam di dalam masyarakat. NPS menerapkan dasar teoritis yaitu pelayanan publik wajib bersifat responsif terhadap beragam kepentingan dan nilai publik yang ada. Pemerintah wajib melaksanakan rundingan bersama untuk mengambil jalan tengah dari berbagai kepentingan masyarakat serta kelompok komunitas, sehingga nilai tersebut dalam penggunaannya didalam pelayanan publik terkandung pemikiran nilai dari masyarakat.

1.5.4. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, kekuasaan, dan kewajiban daerah otonom didalam mengurus dan mengelola segala hal yang harus diurus oleh pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan perundang-undangan. Didalam hal ini berhubungan dengan retribusi parkir di jalan umum, dalam praktiknya, otonomi daerah adalah sumber keuangan, dan sumber PAD lebih penting daripada sumber selain PAD karena daerah dapat dimanfaatkan dengan carasebagai berikut Pendapatan asli: inisiatif dan inisiatif di daerah tersebut. Pada saat yang sama, sumber keuangan baik dana pemerintah maupun non-PAD lebih mengikat.

Dimaksudkan dengan perolehan dan penambahan PAD pemerintah daerah juga dapat mengusahakan peningkatan keahlian dalam menangani segala hal yang harus diurus daerah. Selain didapatkan dari pajak daerah, retribusi daerah dapat diperoleh dari sumbangan kontribusi fiskal yang penting bagi pendapatan daerah.

1.5.5. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk keseluruhan pemasukan tunai yang diterima melalui rekening kas daerah, uang ini akan memberikan tambahan dana ekuitas yang menjadihak PEMDA dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak harus dikembalikan oleh daerah. Menurut Mardiasmo (2009:133), PAD adalah pemasukan yang diperoleh dari berbagai departemen, antara lain departemen perpajakan daerah, kompensasi daerah, hasil badan usaha milik daerah, hasil

pemisahan pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan daerah lainnya. PAD adalah pemasukan yang didapatkan daerah dari sumber atau pos pendapatan dalam daerahnya masing - masing yang diputuskan berdasarkan PERDA dan sejalan dengan aturan yang berlaku. Adanya PAD diusahakan menjadi satu dari sumber - sumber lainnya yang berguna untuk pembiayaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah, dengan menggunakan seluruh peluang dan SDM maupun SDA yang ada di daerah tersebut secara terus - menerus melalui perbaikan kualitas pengelola sumber pembiayaan, perubahan kelembagaan baik itu sistem, cara kerja, struktur dan lainnya serta melaksanakan penilaian dan koreksi sumber, memperkuat dasar hukumnya dan meningkatkan pengawasan. Secara keseluruhan melalui pengeluaran sumber pemasukan yang baru, mengharuskan kewenangan untuk pengelolaan sumber pemasukan dari pusat dan penerbitan PERDA baru, PAD dapat digunakan untuk menaikkan dan membaginya secara adil kesejahteraan masyarakat dengan begitu, daerah dapat mengelola dan mengurus urusannya masing - masing dari sumber maupun pos yang telah diberikan untuk wilayahnya.

Sedangkan pengertian PAD menurut UU No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang berasal dari daerah itu juga. Dimana pemasukan dihasilkan dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang telah dilakukan pemisahan dan lainnya sesuai PAD yang sah. Pendapat lain mengatakan PAD yaitu pemasukan yang dihasilkan daerah yang berasal dari pemasukan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Dari banyaknya pengertian di atas. Penulis menarik

kesimpulan bahwa PAD adalah keseluruhan pemasukan keuangan suatu daerah, yang mana pemasukan keuangan yang berasal dari pos yang mungkin berpotensi menghasilkan uang untuk daerah yang bersangkutan. serta pemasukan keuangan telah diatur oleh PERDA Di dalam penelitian akan membalas salah satu sumbernya yaitu retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum. Adanya parkir liar membuat sumber pendapatan ini tidak masuk ke pemerintahan dan justru masuk kedalam kantong pribadi para juru parkir liar.

1.5.6. Retribusi Daerah

Menurut Seragih (2003) Retribusi adalah pungutan daerah sebagai bentuk timbal balik. Timbal balik ini didasarkan dari layanan yang diberikan berupa pemberian izin tertentu yang disiapkan secara khusus oleh PEMDA baik itu untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Retribusi daerah adalah satu dari beberapa pos pemasukan daerah berkaitan atas pemungutan pajak untuk barang dan jasa yang diberikan oleh pemerintah, hal ini dilandaskan pada efisiensi. Retribusi daerah adalah balasan dari pemberian atau keuntungan yang telah didapatkan secara langsung oleh setiap individu atau badan hukum atas jasa yang benar - benar mereka terima dari pemerintah daerah.

Pada saat yang sama, berdasarkan pendapatan lain menunjukkan bahwa retribusi daerah adalah pajak yang dipungut oleh PEMDA atas layanan atau fasilitas penting yang disiapkan oleh pemerintah kepada semua orang secara langsung dan nyata. Sedangkan menurut Halim (2004: 68) retribusi daerah adalah pendapatan daerah yang didapatkan dari retribusi. Dimana diperuntukkan untuk

daerah dan kota. Dimana telah diatur selaras dengan kewenangan tiap wilayah daerah meliputi 10 jenis retribusi jasa umum dan 4 jenis retribusi perizinan tertentu.

Selain itu, pendapat lainnya mendeskripsikan bahwa retribusi daerah ialah iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah, dan pembayaran tersebut merupakan remunerasi atau kompensasi atas segala sesuatu yang diberikan pemerintah kepada rakyat (Suparmoko, 1988). Pendapat lainnya mengatakan bahwa pemerintah daerah memungut biaya untuk layanan yang diberikannya. Selain itu, biaya dibebankan untuk berbagai izin, berbagai formulir, dan sebagainya. Dimana kebanyakan berasal dari pendapatan yang diklasifikasikan sebagai pungutan (pendapatan).

Sedangkan menurut (Widjaya, 1992) retribusi adalah harga dari suatu pelayanan yang didapat secara nyata dan langsung dari pemerintah daerah dimana pelayanan yang diberikan selalu memperhatikan kualitasnya dan selalu diusahakan untuk dapat terjadi peningkatan agar dapat sesuai dengan besaran retribusi yang ditarik. Pendapat lainnya mengatakan bahwa retribusi adalah pungutan uang sebagai imbalan atas penggunaan yang telah diberikan berupa jasa atas pekerjaan yang dilakukan, usaha atau milik pemerintah yang didasarkan dan diatur dalam peraturan umum yang ditetapkan oleh pemerintah. Terdapat beberapa jenis retribusi daerah terdiri dari tiga, yaitu :

- a. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang ada dapat dinikmati oleh Perorangan atau badan atas jasa yang disediakan atau disiapkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum dan kepentingan kepentingan;
- b. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas pelayanan yang dimiliki PEMDA yang sesuai dengan prinsip perdagangan, sebab pada prinsipnya dapat juga ditawarkan oleh pihak swasta;
- c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas Membina, mengelola, mengawasi dan mengawasi pemanfaatan ruang, SDA, komoditas, prasarana, sarana atau kegiatan tertentu untuk pengembangan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan perizinan swasta atau badan, pemerintah daerah. Kegiatan tertentu dibayarkan untuk mengamankan kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun fungsi dari adanya retribusi daerah ini yaitu antara lain :

- 1) Sumber Pendapatan Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber PAD yang merupakan bagian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maka Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pemasukan daerah.

2) Pengatur Kegiatan Ekonomi Daerah

Nantinya, pajak daerah akan dipergunakan dalam pengaturan program ekonomi daerah. Pemerintah daerah memerlukan anggaran untuk mengelola kegiatan ekonomi, dan saat ini pajak daerah ini dijadikan salah satu sumber anggaran.

3) Stabilitas Ekonomi Daerah

Suatu daerah akan dihadapkan dengan beragam permasalahan di bidang ekonomi, seperti inflasi, pengangguran, dan disparitas ekonomi. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, perpajakan daerah merupakan modal krusial untuk menemukan jalan keluar (misalnya membuat lapangan kerja, mengendalikan harga pasar, dll.).

4) Pemerataan dan Pembangunan Pendapatan Masyarakat

Jika fungsi lainnya yang terlebih dahulu disebutkan di atas diselesaikan dengan baik, maka fungsi ini secara otomatis juga dapat tercapai, dengan tercapainya fungsi ini maka permasalahan seperti ketimpangan sosial dan pengangguran dapat diselesaikan dengan lebih baik.

1.5.7. Manajemen

Manajemen berasal dari kata "to manage" yang berarti mengelola, mengurus atau mengatur. Maka manajemen mempunyai unsur yang sifatnya pengelolaan. Adapun menurut Hasibuan (2016) manajemen yaitu ilmu dan seni untuk mengelola seluruh tahapan penggunaan SDM dan lain-lain secara efektif dan efisien upaya terwujudnya tujuan. Sedangkan Robbins, S& Coulter (2012) mengungkapkan bahwa manajemen ialah proses koordinasi pengawasan kegiatan yang telah dilakukan yang mana kegiatan dilakukan secara efisien dan efektif dalam memperoleh tujuannya.

Menurut Safroni (2012) manajemen adalah proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasi, kepemimpinan, dan mengendalikan organisasi dan proses pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki guna terwujudnya tujuan. Sedangkan menurut Nugroho (2003) merupakan proses mengatur dan menangani suatu hal agar dapat mencapai tujuannya. Maka dari itu diperlukan manajemen agar tujuan dapat tercapai, selain itu manajemen yang dilakukan pun tidak boleh asal jalan saja, manajemen harus dilakukan secara baik, matang dan bersungguh-sungguh agar tujuannya pun dapat dicapai secara maksimal tanpa hambatan.

Dari berbagai pengertian diatas dapat diketahui bahwa manajemen meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan yang berusaha mewujudkan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya secara efektif dan efisien mungkin. Dimana dengan terlaksanakannya fungsi manajemen yang sesuai dapat memperbaiki, meningkatkan dan mengembangkan organisasi

yang melakukan manajemen baik itu pemerintahan, swasta maupun lainnya. Berjalannya manajemen memberikan bukti bahwa organisasi telah melengkapi segala persyaratan yang ada dan mempunyai perangkat kerja yang mampu untuk menjamin kualitas, kepercayaan, dan kewenangan sebuah institusi dalam menetapkan suatu aturan, menghasilkan putusan serta perbaikan kegiatan dan keputusan yang menggambarkan pemikiran dan hal yang dibutuhkan masyarakat. Utamanya, melalui manajemen, pemerintahan akan mendapatkan keuntungan yakni peningkatan kepercayaan masyarakat, meningkatkan keikutsertaan masyarakat, dan lainnya. Namun jika manajemen yang dijalankan mengalami kegagalan atau tidak berjalan sesuai rencana maka akan merugikan pemerintahan yang mana dapat menurunkan bahkan menghancurkan kepercayaan yang telah dibangun, menurunkan efektivitas kerja, dan lainnya.

1.5.8. Fungsi Manajemen.

Fungsi manajemen adalah elemen dasar yang melekat dan selalu ada dalam proses manajemen yang mana menjadi tolak ukur dalam memenuhi fungsi manajemen guna terwujudnya tujuan. Ada beberapa pendapat ahli mengenai fungsi manajemen. Menurut George R. Terry (2006) menjelaskan bahwa fungsi manajemen meliputi:

1. Perencanaan (Planning) adalah proses penentuan informasi dan usaha untuk menyambungkan informasi satu dengan lainnya, yang pada akhirnya menghasilkan perkiraan dan peramalan mengenai kondisi. Yang nantinya akan mempermudah untuk merumuskan tindakan yang harus dilakukan di masa depan yang memang dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan.

2. Pengorganisasian (Organizing) merupakan suatu kegiatan pelaksanaan secara nyata semua kegiatan yang mewajibkan adanya kegiatan antara kelompok kerja dan memutuskan wewenang tertentu serta tanggung jawab yang akhirnya dapat mencapai suatu kesatuan usaha dalam mewujudkan tujuan yang ingin diraih.
3. Pergerakan (Actuating) adalah memosisikan keseluruhan anggota dibandingkan kelompok sebagai upaya untuk mereka dapat bekerja secara maksimal untuk dapat mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Selain kegiatan yang dijalankan dapat berjalansesuai rencana.
4. Pengawasan (Controlling) merupakan tahapan pemutusan yang didapatkan, pengukuran dan koreksi atas aktivitas yang dijalankan dan apabila diperlukannya pengambilan keputusan untuk suatu tindakan korektif sehingga aktivitas yang dijalankan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan maka dari itu digunakanlah suatu analisis untuk mempermudah melihat tahapan tersebut.

1.5.9. Manajemen Parkir

Manajemen parkir diatur berdasarkan peraturan daerah tentang parkir itu sendiri. Hal ini dikarenakan agar manajemen parkir tersebut memiliki landasan yang kuat dibidang hukum dalam pelaksanaannya. Selain itu dengan adanya peraturan daerah yang melandasi maka hal ini dijadikan sebagai usaha agar masyarakat lebih patuh karena adanya peraturan yang harus ditaati dalam manajemen parkir. Masyarakat nantinya akan menaati kebijakan yang diterapkan dan berusaha untuk tidak melanggar karena jika kita ketahuan melanggar akan diberikan sanksi yang tegas. Adapun Dasar Pengaturan mengenai parkir adalah Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2004 tentang Parkir Tepi Jalan Umum. Menurut Perda tersebut Parkir adalah keadaan diam atau tidak bergerak suatu kendaraan dalam waktu sementara namun pengemudi tidak meninggalkan kendaraan. Lalu untuk tarif parkir merupakan alat yang dibutuhkan untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang parkir. Dasar penetapan Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Perwal No. 9 Tahun 2018 tentang Tarif

1.5.10. Pengertian Parkir

Parkir adalah imobilitas sementara kendaraan. Pengertian lainnya yaitu parkir ialah semua kendaraan tidak boleh terus menerus melaju dan harus berhenti beberapa saat (bongkarmuat) atau berhenti dalam waktu yang lama dalam suatu waktu, inilah yang disebut dengan parkir. Parkir mengacu pada keadaan di mana kendaraan berhenti mengemudi atau diam selama jangka waktu tertentu dan ditinggalkan oleh pengemudi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dimaknai bahwa untuk kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor, perpajakan ialah keadaan yang tidak bergerak, sesuai dengan situasi dan kebutuhan, perpajakan merupakan awalan dari perjalanan dengan jangka waktu tertentu yang disesuaikan melihat situasi dan kebutuhannya yang memerlukan suatu area sebagai lahan untuk berhenti yang digalangkan baik oleh pemerintah maupun pihak lainnya.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, parkir dianggap sebagai upaya untuk memarkir atau memarkir sementara (kendaraan bermotor) di tempat yang telah disiapkan. Pengertian di atas mengandung pengertian penyedia jasa parkir, yaitu penyedia tempat (kendaraan bermotor) yang menerima parkir atau penempatan untuk jangka waktu tertentu. Jika melihat dari fungsi parkir, juga menganggap bahwa parkir digunakan sebagai tempat menyimpan barang, artinya jika seseorang mendapatkan sesuatu dari orang lain, syaratnya dia menyimpannya dan mengembalikannya dalam bentuk aslinya menurut Pasal 1694 KUH Perdata.

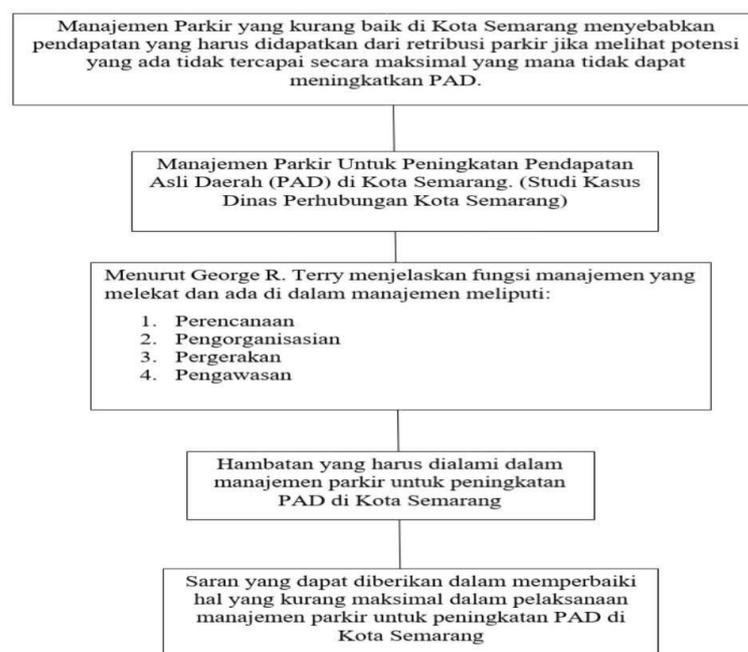
Menurut isi Pasal 1694 KUH Perdata, penitipan yaitu suatu perjanjian “ riil ” yang artinya bahwa ia barusan saja terjadi dengan dilakukannya suatu tindakan yang nyata, yaitu diberikannya barang yang dititipkan. Oleh karena itu, bentuk pelayanan perpajakan ini berbedadengan kesepakatan lain yang biasanya memiliki konsensus, yaitu lahir setelah tercapai kesepakatan mengenai pokok-pokok kesepakatan. Oleh karena itu parkir bisa dimaknai sebagai keadaan kendaraan yang tidak bergerak sementara karena ditinggalkan oleh pengemudi. Parkir di tengah jalan raya dilarang secara hukum, tetapi parkir di pinggir jalan

biasanya diizinkan. Fasilitas parkir didirikan bersama dengan sebagian besar bangunan untuk memfasilitasi kendaraan penghuni gedung. Yang dimaksud dengan parkir adalah kendaraan yang diparkir di tempat tertentu, baik yang dicantumkan rambu lalu lintas maupun tidak, dan bukan hanya untuk tujuan bongkar muat orang dan / atau barang. Namun nyatanya, karena adanya masalah parkir di Kota Semarang, terdapat parkir liar.

1.5.11. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir diperlukan agar mempermudah memberikan gambaran terhadap pelaksanaan penelitian. Kerangka berpikir dalam penelitian manajemen Parkir Untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Semarang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1.
Kerangka Berpikir



Sumber : Data Olahan Peneliti

Berdasarkan kerangka di atas dapat diketahui bahwa alur pemikiran peneliti dalam upaya menyelesaikan persoalan di penelitian tentang manajemen parkir dengan menggunakan teori dari George R. Terry (2006:342) fungsi manajemen yang merupakan elemen dasar yang harus melekat yang mana terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan. Penggunaan prinsip teori ini disebabkan kajian ini akan melihat aspek manajemen yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang.

1.6. Operasionalisasi Konsep

Operasional konsep merupakan unsur-unsur yang berusaha menjelaskan bagaimana cara menilai dan pengukuran suatu variabel sehingga hasil dari penelitian dan pengukuran tersebut dapat dijadikan bahan untuk tahu indikator mana saja yang menjadi pendukung untuk dilakukannya penganalisaan dari variabel tersebut. Dari pengertian diatas maka indikator penelitian dapat diketahui dari pemaparan di bawah ini :

Fungsi manajemen

Fungsi manajemen merupakan elemen krusial untuk menjamin organisasi bekerjasesuai untuk dapat mencapai tujuan. Menurut George R. Terry (2006:342) menjelaskan bahwafungsi manajemen meliputi :

1. Perencanaan (Planning) adalah proses penentuan informasi dan usaha untuk menyambungkan informasi satu dengan lainnya, yang akhirnya menghasilkan perkiraan dan peramalan mengenai kondisi. Nantinya akan mempermudah untuk merumuskan tindakan yang harus dilakukan di masa depan.

2. Pengorganisasian (Organizing) merupakan suatu kegiatan pelaksanaan secara nyata semua kegiatan yang mewajibkan adanya kegiatan antara kelompok kerja dan memutuskan wewenang tertentu serta tanggung jawab yang akhirnya dapat mencapai suatu kesatuan usaha dalam mewujudkan tujuan yang ingin diraih.
3. Pergerakan (Actuating) adalah memosisikan keseluruhan anggota dibandingkan kelompok sebagai upaya untuk mereka dapat bekerja secara maksimal untuk dapat mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Selain kegiatan yang dijalankan dapat berjalansesuai rencana.
4. Pengawasan (Controlling) merupakan tahapan pemutusan yang didapatkan, pengukuran dan koreksi atas aktivitas yang dijalankan dan apabila diperlukannya pengambilan keputusan untuk suatu tindakan korektif sehingga aktivitas yang dijalankan dapat terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan.

1.7. Argumen Penelitian

Kota sering dianggap sebagai pusatnya segala aktivitas yang ada, segala bentuk aktivitas dan kemewahan yang terjadi berjalan seirama dengan permasalahan salah satu permasalahannya munculnya parkir liar dimana parkir liar ini akhirnya menimbulkan masalah lainnya. Berdasarkan data yang telah didapat diketahui Dalam sepuluh tahun terakhir, jumlah kendaraan bermotor di Semarang berkembang pesat. Diketahui hingga akhir tahun 2019, jumlah kendaraan motor yang beroda 2 dan 4 yang ada di Kota Semarang berjumlah

kurang lebih 1.616.505 yang meliputi dari 1.370.402 unit kendaraan beroda 2 (85 %) dan 246.103 unit kendaraan beroda 4 (15 %). Tentunya dengan beragam kendaraan bermotor yang semakin meningkat dan menggiatkan permintaan akan tempat parkir yang saat ini menggunakan jalan sebagai tempat parkir. Persoalan parkir di Kota Semarang dikarenakan oleh berbagai hal yaitu :

- a. Tempat parkir yang sangat sedikit dan terbatas
- b. Meningkatnya jumlah kendaraan pribadi
- c. Munculnya pihak yang berusaha menjadikan situasi ini untuk membuka usaha parkir ilegal
- d. Tidak baiknya koordinasi antar instansi terkait mengenai persoalan parkir
- e. Tarif parkir yang tidak sesuai aturan dan terkesan seenaknya

1.8. Metode Penelitian

Penelitian dan penggunaan metode untuk mendapatkan data-data yang diperlukan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan, dan tentunya jika menggunakan metode akan lebih akurat dan terhindar dari kesalahan. Selain itu, penggunaan metode ini untuk mengetahui keakuratan dalam menganalisis data yang diperoleh sebelumnya. Metode penelitian sendiri merupakan sarana utama mengembangkan IPTE. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang berlandaskan pada realitas, digunakan pada kondisi objek yang alamiah, serta peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengelompokan data dilakukan

secara triangulasi, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan realitas nyata dari pada penalaran. Oleh sebab itu penelitian Manajemen Parkir Guna Peningkatan PAD di Kota Semarang ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodis dan konsisten.

1.8.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini, yang mana tipe ini berusaha menjelaskan gambaran atas suatu fenomena atau subyek penelitian. Disini maka penelitian akan menjelaskan Manajemen Parkir di Kota Semarang untuk meningkatkan PAD. Penelitian kualitatif memberikan ruang yang lebih luas bagi objek penelitian untuk memberikan penjelasan atas suatu peristiwa yang dialami. Sehingga Hal tersebut memudahkan peneliti untuk dapat memahami suatu peristiwa secara mendalam

1.8.2. Situs Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kota Semarang, dan situs penelitiannya adalah di Kantor Dinas Perhubungan Kota Semarang dan pihak-pihak lain yang memiliki hubungan dengan manajemen parkir. Penelitian di Dinas Perhubungan Kota Semarang dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan manajemen parkir disebabkan pihak lainnya yang berwenang dan berpengaruh dalam manajemen parkir di Kota Semarang. Selain itu Kota Semarang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada masalah parkir yang disebabkan karena untuk melihat manajemen parkir di Kota Semarang dalam upaya meningkatkan PAD.

1.8.3. Subyek Penelitian

Dalam proses pengumpulan data yang dibutuhkan akan selalu mencoba mencari objek yang akan diteliti baik itu orang, aktivitas dan kejadian terkait. Menurut Sugiono (2017) populasi ialah keseluruhan wilayah yang digeneralisasikan yang memuat objek / tema dengan kualitas dan ciri khusus yang telah disusun oleh peneliti dan nantinya digunakan dan kemudian dipahami maknanya. Maka dari itu populasi bukan hanya pada manusia, tetapi benda alam serta keseluruhan karakteristik objek dan subyek penelitian.

Berdasarkan pemahaman tersebut maka jika dilihat dari wawancara, observasi, dan studi kepustakaan dan dokumentasi, maka populasi dalam penelitian ini ada tiga pihak yaitu, Dinas perhubungan Kota Semarang sebagai pelaksana kebijakan, petugas parkir sebagai Manajer parkir di tempat, dan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir. Sedangkan sampel termasuk bagian dari populasi yang ditentukan melalui cara tertentu. Apabila populasi yang diteliti besar dan kurang memungkinkan untuk peneliti mengkaji keseluruhan yang ada di dalam populasi disebabkan keterbatasan anggaran, waktu, tenaga, dll maka sampel dapat dijadikan solusi. Sampel yang merupakan bagian dari populasi ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai simbol atau representasi dari keseluruhan objek survei. Untuk mengetahui jumlah sampel yang diperlukan dalam penelitian yaitu bisa dengan cara peneliti menjadikan semua populasi sebagai sampel, hal ini disebabkan sejak awal populasi yang diteliti jumlahnya kecil, sehingga penulis menyebutnya sebagai sampel jenuh atau teknik sensus.

Melihat penjelasan mengenai populasi dan sampel diatas maka Informan penelitian Manajemen Parkir di Kota Semarang Guna Peningkatan PAD Studi Kasus di Dinas Perhubungan Kota Semarang selain menggunakan sampel jenuh, penelitian ini juga menggunakan *Purposive sampling*. *Purposive sampling* yaitu teknik memilih sampel sumber data dengan menggunakan cara tertentu, contohnya narasumber tersebut dirasa paham betul mengenai topik yang sedang diteliti. Jadi informan yang dipilih oleh peneliti memang sungguh dilakukan dengan pihak atau orang yang memiliki hubungan langsung ke dalam persoalan yang diteliti. Atau dalam penelitian ini paham betul perihal permasalahan Manajemen Parkir di Kota Semarang. Teknik *purposive sampling* digunakan karena peneliti berpendapat bahwa sampel yang dipilih memang paham tentang persoalan yang ingin diteliti oleh peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini ialah pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan tempat penelitian antara lain:

- 1) Dinas Perhubungan Kota Semarang sebagai pelaksana kebijakan
- 2) Petugas parkir sebagai Manajer parkir di tempat
- 3) Masyarakat sebagai pengguna jasa parkir

Melihat Subyek penelitian maka dapat disimpulkan fenomena penelitian dalam kajian Manajemen Parkir untuk meningkatkan PAD di Kota Semarang dapat ditinjau dari aspek sosial, yaitu masih kurangnya kesadaran pihak - pihak terkait terutama yang mengelola parkir liar untuk mengelola pelaksanaan lebih baik lagi misalnya sosialisasi mengenai aturan yang dipakai dalam mengelola parkir di Kota Semarang. Selain itu di masyarakatnya sendiri kurangnya kesadaran untuk tidak menggunakan jasa parkir liar dan banyaknya juru parkir

liaryang memanfaatkan keadaan untuk keuntungannya pribadi. Aspek yang lain yakni aspek lingkungan, pengaruh lingkungan baik itu internal maupun eksternal, maupun faktor lainnya beragam hal yang mempengaruhi jalannya manajemen menjadi tidak berjalan dengan baik. Selain itu fenomena tersebut juga dapat dilihat dari aspek kebijakan, yakni kebijakan manajemen parkir di Kota Semarang belum dapat berjalan dengan baik, berbagai permasalahan dan kurangnya sanksi yang tegas. Fenomena – fenomena inilah yang menyebabkan Pendapatan Asli Daerah menurun atau tidak sesuai target dan tidak terjadi peningkatan padahal Parkir merupakan retribusi daerah yang cukup besar menyumbangkan dana.

1.8.4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis mengenai wawancara, atau pengamatan, atau daftar pertanyaan, yang digunakan untuk memperoleh suatu informasi. Sehingga instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu : catatan lapangan (field notes), alat untuk merekam suara atau gambar (tape recorder, kamera foto, video dan sebagainya

Instrumen utama penelitian pada penelitian kualitatif kali ini yakni peneliti sendiri, didasarkan pada perasaan penasaran / ingin tahu dan keinginan untuk mencari informasi atau data yang berhubungan dengan permasalahan yang ingin diteliti oleh peneliti. Walaupun seperti itu dalam prosesnya penelitian Manajemen Parkir untuk peningkatan PAD di Kota Semarang, sudah barang tentu memerlukan instrumen lain sebagai yang dibutuhkan sebagai instrumen pendukung. Instrumen pendukung ini seperti yang dijelaskan oleh Gulo. Instrumenlainnya yakni perekam suara, alat dokumentasi atau kamera untuk

merekam dan menyimpan hasil penelitian sebagai bukti bahwa benar-benar melakukan penelitian dan hasil yang dituliskan dalam penelitian merupakan hasil yang nyata bukan fiktif.

1.8.5. Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah data kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan berbagai data seperti teks, kata tertulis, frasa atau simbol yang menjelaskan atau mempresentasikan manusia, perbuatan, dan kejadian dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu nantinya penelitian ini akan menggunakan data – data yang terkait dengan Manajemen Parkir untuk peningkatan PAD di Kota Semarang.

1.8.6. Sumber Data

Data adalah unsur krusial yang ada di penelitian karena mengandung informasi sesungguhnya yang memang terjadi di lapangan. Dalam upaya mendapatkan data yang relevan dan lengkap yang dapat diverifikasi tidaklah mudah dibutuhkan proses pengumpulan data yang benar. Jenis data dalam penelitian ada 2 yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah sumber data penelitian yang diambil langsung dari sumber aslinya, meliputi wawancara, survei opini publik perorangan atau per kelompok (person) atau pengamatan terhadap objek, peristiwa dan lainnya. Atau dapat dikatakan, peneliti perlu mendapatkan data dengan menjawab pertanyaan penelitian (metode survei) atau subjek penelitian (metode observasi).

2. Data Sekunder adalah Sumber data penelitian didapatkan tidak langsung atau melalui perantara misalnya dalam bentuk buku, laporan, atau jurnal yang ada, baik yang telah dipublikasi maupun belum dipublikasikan. Atau dapat dikatakan, peneliti memperoleh data dengan mendatangi tempat – tempat seperti perpustakaan, pusat penelitian, pusat arsip yang memang menyediakan data sekunder.

1.8.7. Teknik Pengumpulan Data

Untuk meraih sesuatu yang dituju dalam hal ini tujuan penelitian, teknik pengumpulandata yang tepat harus digunakan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, data yang benar dan akurat sangat sulit ditemukan, maka diperlukan teknik pengumpulan data yang benar. Keberhasilan atau kegagalan penelitian sangat tergantung pada keakuratan alat dan metode yang digunakan untuk mendapatkan data atau penyedia informasi yang diperlukan untuk penelitian. Teknik pengumpulan data sendiri ada beberapa macam yakni antara lain :

1. Wawancara (interview) merupakan suatu teknik memperoleh data dengan cara 2 orang ataulebih melakukan pertemuan untuk saling membagikan informasi satu sama lain melalui proses tanya jawab yang akhirnya nanti memperoleh penjelasan mengenai topik tertentu (Sugiono, 2017).
2. Pengamatan (observation) adalah cara memperoleh data dengan melihat dan mencatat segala gejala yang ditemukan pada obyek penelitian di mana fenomena, kondisi, kejadian, atau situasi tersebut terjadi secara langsung.

3. Dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan memeriksa dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian. Memperolehnya dengan membaca literatur media cetak dan elektronik.
4. Kuesioner adalah seperti kita ketahui bersama, pengumpulan data melalui kuesioner adalah dengan menanyai responden. Pertanyaan yang diajukan sangat detail. Kuesioner itu sendiri diisi oleh narasumber.

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan studi kepustakaan atau dokumentasi untuk memperoleh data. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari catatan penelitian sebelumnya dan catatan narasumber dan orang lain yang terkait dengan penelitian. Peneliti menggunakan metode dokumentasi ini untuk mencatat berbagai kegiatan dan memudahkan peneliti mendapatkan data yang relevan. Peneliti akan mengumpulkan data terkait manajemen parkir untuk meningkatkan PAD di Kota Semarang. Studi dokumentasi dari dokumen-dokumen yang ada berupa beragam literatur, laporan serta dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Untuk memperoleh data dari dokumentasi yakni dengan cara membaca, merekam atau menyalin dokumen, arsip dan laporan data lainnya yang masih ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti, data dapat dikumpulkan melalui dokumen. Tujuannya agar data yang digunakan berhubungan erat dengan keutamaan penelitian ini, dan dapat dijadikan sebagai modal penunjang guna mendukung analisis data penelitian.

1.8.8. Analisis Informasi Atau Data

Menurut Sugiyono (2017), Analisis data merupakan tahap pencarian serta pengorganisasian data secara sistematis. Datanya sendiri didapatkan dengan cara yang beragam misalnya wawancara, pencatatan lapangan, dan dokumentasi. Metode yang digunakan adalah menyusun dan mengelola data sebagai kategori, menggambarkannya sebagai unit, menyintesis pola, memilih pola yang penting atau tidak penting untuk pembelajaran, dan menarik kesimpulan. Agar mudah bagi saya dan orang lain untuk memahaminya. Pada penelitian ini teknik analisis data melewati beberapa tahapan. Tahapan pertama dalam pengolahan data kualitatif yakni reduksi data. Tahap kedua yakni penyajian data atau display. Lalu ketiga yakni data yang sudah disajikan akan diverifikasi atau disimpulkan dengan mencari bukti-bukti pendukung.

1.8.9. Kualitas Data

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999) terdapat 2 konsep dalam mengukur kualitas suatu data yaitu melalui reabilitas dan validitas. Untuk mengetahui kualitas data yang telah didapatkan dari penggunaan instrumen penelitian dapat diuji dengan 2 cara diatas. Pada penelitian kali ini akan menggunakan salah satunya saja yaitu uji validitas. Dimana validitas data adalah jaminan bagi keseriusan kesimpulan dan penafsiran makna sebagai hasil penelitian. Terdapat berbagai cara yang dapat digunakan dalam mengembangkan validitas (kesahihan) penelitian yang telah dilakukan yaitu menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi ialah suatu teknik pemeriksaan dimana keaslian data dilakukan dengan cara memanfaatkan hal lainnya diluar

data penelitian untuk melihat keaslian data yang telah diambil. Dimana fungsi hal lainnyatersebut untuk pembanding. Hal ini dikarenakan pada dasarnya triangulasi memiliki sifat multiperspektif yang mana mengambil kesimpulan dari pandangan yang berbeda. Trangulasi sumber data adalah teknik yang digunakan pada penelitian yang mana fokus penelitian agar saat pengumpulan data yang diperlukan wajib menggunakan berbagai jenis data yang tersedia. Triangulasi menggunakan beragam jenis sumber data untuk mendapatkan atau memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Maka dari itu apa yang didapatkan dari sumber satu akan diuji dengan membandingkannya pada data sejenis yang didapatkan dari sumber satunyayang beda.